RESUME MATA KULIAH HUKUM TATANEGARA

NAMA : Isnaul Khaer
NIM : 10200120260
KELAS : HTN-F

A. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP KAJIAN , DAN HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA.

1. Pengertian HukumTataNegara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin (dalam arti sempit). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah

Pengertian Menurut Para Ahli

a. Menurut Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut

b. Menurut Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organorgan dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

c. Menurut VanderPot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

d. Menurut Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum

tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

e. Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Secara khusus istilah Hukum Tata Negara merupakan adaptasi terjemahan dan istilah yang digunakan untuk nama lapangan ilmu hukum ini yang telah lama berkembang dan mempengaruhi pola pemikiran akademik di negara kita. Studi literatur menunjukkan bahwa istilah Hukum Tata Negara merupakan terjemahan dari istilah *staatsrecht* yang sudah lama digunakan dalam tradisi akademik maupun praktik hukum di Belanda. Istilah ini memiliki dua pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit *staatsrecht in ruime zin* (HTN dalam arti luas) dan *staatsrecht in engere zin* (HTN dalam arti sempit).

2. Ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara

Ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara adalah mengenai organisasi negara yang mencakup lembaga - lembaga negara, hubungan satu dengan yang lain, dan kekuasaannya. Selain itu, juga mencakup warga negara termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), dan wilayah negara.

Dalam dengan ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara, Logemann dalam bukunya ***"Het Staatsrecht van Indonesie"***, seperti dikutip **Usep Ranawidjaja**, menyatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai organisasi (tata susunan) negara yang mencakup dua bidang pokok, yaitu: hukum mengenai kepribadian hukum dari jabatan - jabatan; dan hukum mengenai lingkungan kekuasaan negara yaitu lingkungan manusia tertentu, lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu.

3. Hubungan hukum Tatanegara dengan ilmu lainnya.

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

Jika membicarakan hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik tentunya sangat karib dengan pendapat Prof. Barents di dalam bukunya *Wetenschap der Politiek*. Dia merefleksikan hubungan Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara seperti daging dengan tulangnya yang apabila ingin melihat dan mengetahui tulang tentunya yang perlu dibedah terlebih dahulu adalah dagingnya.

Konsep ini juga disepakati oleh pendapat Hoetink yang turut menguraikan pikirannya bahwa Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara menyelidiki kerangka yuridis negara, sedangkan Ilmu Politik menyelidiki di sekitar kerangka tersebut yang

disebutnya semacam sosiologi negara .

Pandangan-pandangan tersebut tentunya sangat berlandaskan dari dinamika negara yang tentunya tidak lepas dari gejala-gejala kemasyarakatan. Karena salah satu dari unsur negara itu sendiri adalah adanya masyarakat yang dikategorikan sebagai warga negara.

Contohnya saja pembubaran DPR dan dibentuknya DPR GR terjadi karena adanya dinamika atau fase di mana negara harus mengambil keputusan tersebut, begitupun dengan lahirnya lembaga anti korupsi seperti KPK terjadi karena adanya gejala kemasyarakatan. Inilah bukti konkrit bahwa hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik sangat kuat, karena dalam beberapa kejadian ilmu politiklah yang mempengaruhi terjadinya dinamika dalam ketatanegaraan.

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara merupakan konsentrasi ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Hal ini didasarkan dengan persamaan objek kajiannya yakni negara.

Tentunya muncul pertanyaan di manakah letak hubungan antara keduanya? Hubungan tersebut dapat dilihat dari berbagai uraian berikut :

Ilmu negara yang pertama kali di perkenalkan oleh Georg Jellinek sebagai sebuah pengetahuan mengandung arti sebagai ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasa terdapat pada setiap negara.

Kata umum menunjukkan dasar kajian dari Ilmu Negara mencakup hal-hal yang bersifat umum, seperti teori terbentuknya negara, sifat dan hakikat negara, unsur-unsur negara, bentuk-bentuk negara, tujuan dan fungsi negara yang semuanya itu merupakan asas-asas pokok. Inilah yang meletakkan posisi ilmu negara sebagai *staatswissenschaften*.

Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum tata negara dan hukum administrasi negara seperti sangat berhubungan erat, hubungan ini dapat dilihat dengan berbagai referensi yang selalu menyandingkan keduanya. Bahkan terkadang sulit memisahkan definisi antara keduanya. Namun meskipun demikian tentulah keduanya mempunyai peran masing-masing yang dapat dijadikan sebagai sebuah pembeda.

Perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara dipandang dengan dua sudut pandang yang berbeda. Pandangan yang pertama yang diyakini oleh Prof Mr. R Kranenburg dan beberapa pakar yang lain bahwa perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara bukanlah perbedaan yang prinsipil

namun hanya mengenai pembagian tugasnya saja inilah yang disebut aliran Historis Yutilitis. Pandangan lainnya yang berada pada aliran Relativisme lebih menguraikan bahwa perbedaan keduanya terletak dari cara peninjauan objeknya

Jika menelaah lebih mendalam pandangan kedua aliran ini sebenarnya dari segi substansinya sama saja. Pandangan kedua mengatakan bahwa cara meninjau objeknyalah yang menjadi pembeda dapat dikatakan benar karena hukum tata negara memandang negara sebagai sebuah organisasi jabatan-jabatan seperti apa yang telah dikemukakan oleh J.H.A Logemann.

Sedangkan hukum administrasi negara memandang negaranya sebagai kegiatan administrasi atau pelaksanaan tugas. Implikasi dari perbedaan meninjau objek tersebut akan melhiarkan perbedaan tugas-tugas antara kedua hukum ini itulah yang dimaksudkan aliran yang pertama.

B. SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Sumber-sumber hukum tata negara ada lima, yaitu: 1. Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang berlaku di suatu negara. Hukum ini tidak mengatur halhal yang terperinci melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan-peraturan lainnya. Undang-Undang Dasar merupakan naskah konstitusi yang tertulis dalam satu kodifikasi.

Indonesia memiliki UndangUndang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, yang mana sebelumnya pernah berubah-ubah. Pertama naskahnya berupa UUD 1945 periode pertama dari tahun 1945 sampai 1949. Periode kedua konstitusi RIS tahun 1949. Ketiga, UUDS 1950. Keempat, UUD 1945 periode kedua tahun 1959 sampai 1999. Kelima, UUD 1945 periode ketiga tahun 1999 sampai 2000. Keenam, UUD 1945 periode keempat tahun 2000 sampai 2001. Ketujuh, UUD 1945 periode kelima tahun 2001-2002 dan terakhir UUD 1945 periode keenam tahun 2002 sampai sekarang.

Peraturan perundangundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Indonesia memiliki peraturan perundang-undang yang diatur dalam UU No 12 tahun 2011 pasal 7. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Materi muatan undang-undang dasar meliputi :
Jaminan terhadap hak-hak• asasi manusia dari warga Negara
Membebaskan kekuasaan dari• kontrol mutlak penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.
- b. Ketetapan MPR Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003”

C. ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

a. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/ asas dasar negara adalah Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara republik Indonesia. Perubahan undang-undang dasar 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

b. Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa ” Negara Indonesia adalah negara hukum dimana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945”. Atas ketentuan yang tegas diatas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian semua pejabat/alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

c. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat. Sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945 berbunyi : ” Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD “. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945.

d. Asas Negara Kesatuan

Pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan/ memproklamkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan ” Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik”. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada ditangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat.

e. Asas Pembagian kekuasaan dalam check and balances

Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh :

John Locke yaitu Kekuasaan legislatif, Kekuasaan eksekutif, Kekuasaan federatif. Sedangkan Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu trias politica, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya.

D. SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan menjadi sesuatu yang selalu sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan bukan saja karena dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah memberlakukan sistem pemerintahan Presidensial maupun parlementer, tetapi juga karena dalam pelaksanaan kedua sistem tersebut sering menimbulkan permasalahan karena ketidaktegasan dan ketidakjelasan terhadap sistem yang diberlakukan. Pada awal kemerdekaan, terlepas dari kondisi darurat dan sifat kesementaraannya. Undang-Undang Dasar yang ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 mengatur dengan tegas bahwa sistem pemerintahan menganut sistem Presidensial. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa Presiden adalah sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Dalam hal ini Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu, Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi tergantung kepada Presiden. Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang tertentu kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun demikian, pemberian wewenang tersebut tidak diikuti dengan batasan-batasan terhadap penggunaannya. Soekarno, sebagai Presiden pertama RI, dalam rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar kilat. Hal ini dikarenakan mendesaknya keinginan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu sehingga infrastruktur bagi sebuah negara yang merdeka harus segera disiapkan. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang singkat dan sangat multi interpretatif. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar oleh Undang-Undang Dasar 1945, dimana pada masa awal pemerintahan, kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya sekedar berdasarkan Pasal 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 saja, tetapi juga berdasarkan Pasal IV aturan Peralihan yang berbunyi: "Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Akibat dari ketentuan peralihan tersebut, Presiden dengan sah dapat bertindak sebagai diktator karena bantuan Komite Nasional sama sekali tidak dapat diartikan suatu pengekanan atas kekuasaannya.

E. KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN HUKUM TATANEGARA

Pendapat Cato, dapat dipahami secara lebih pasti bahwa konstitusi republik bukanlah hasil kerja suatu waktu ataupun satu orang, melainkan kerja kolektif dan akumulatif. Oleh karena, dari sudut etimologi .

Konstitusi (UUD) adalah sebuah norma system politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum

Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan perubahan, jumlah butir ketentuan yang tercakup dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yaitu hanya terdiri dari 71 butir ketentuan. Setelah dilakukan perubahan sebanyak empat kali dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 hingga tahun 2002, butir ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melonjak drastis menjadi 199 butir. Dari 199 butir ketentuan tersebut, hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebanyak 174 butir ketentuan selebihnya atau lebih dari 300 persen adalah ketentuan yang baru sama sekali.

Nilai konstitusi terdapat 3 yaitu nilai normative yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Nilai nominal yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan nilai semantic yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Idealnya nilai konstitusi harus dijalankan secara normative untuk mencapai tujuan negara

Sifat konstitusi yaitu **luwes , kaku , tertulis dan tidak tertulis**

Sifat luwes karena terbukti bahwa MPR telah melakukan perubahan (amandemen) sebanyak 4 kali. Sifat kaku karena untuk mengubahnya terbilang cukup sulit. Dikatakan sebagai konstitusi tertulis jika ditulis dengan suatu naskah. Sedangkan dinyatakan tidak tertulis yaitu jika konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah melainkan dalam suatu konvensi atau undang-undang biasa.

Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan.

Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, dan untuk melepaskan control kekuasaan dari penguasaan sendiri.

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla memaparkan, terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadi perubahan besar dalam amandemen, yaitu euphoria reformasi, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (TAP MPR), UU yang sudah terbit, dan proses studi banding..

F. ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA.

Kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran dan keteraturan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan negara yang bertujuan memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.

Macam kekuasaan negara

Dalam buku Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006) karya Astim Riyanto, menurut teori tokoh John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga, yakni:

a. Kekuasaan legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membenarkan undang-undang. Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), sebelum munculnya badan legislatif, hukum didikte oleh raja. Legislatif awal termasuk parlemen Inggris dan Icelandic Althing (didirikan sekitar 930).

Kekuasaan mereka dapat mencakup pengesahan undang-undang, penetapan anggaran pemerintah. Kemudian pengukuhan janji eksekutif, penyelidikan cabang eksekutif, memakzulkan dan memindahkan dari anggota kantor eksekutif dan kehakiman. Selain itu juga memperbaiki keluhan konstituen. Anggota dapat ditunjuk atau dipilih secara langsung dan tidak langsung. Mereka dapat mewakili populasi, kelompok tertentu, atau wilayah teritorial. Dalam sistem presidensial, eksekutif dan legislatif terpisah. Pada sistem parlementer, anggota cabang eksekutif dipilih dari keanggotaan legislatif.

b. Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Mereka juga memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selain itu juga menunjuk pejabat, merumuskan dan melembagakan kebijakan luar negeri.

c. Kekuasaan federatif

Kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan negara menurut Montesquieu lewat teori Trias Political membagi kekuasaan dalam tiga macam, yakni: Kekuasaan legislatif, Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

d. Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam kekuasaan tersebut juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pada kekuasaan tersebut sering juga menyelesaikan kasus-kasus administrasi, perselisihan antara individu, kelompok, badan hukum, dan lembaga pemerintah mengenai penerapan undang-undang atau implementasi program pemerintah.

Sebagian besar sistem hukum telah memasukan prinsip kedaulatan negara. Di mana pemerintah tidak dapat digugat oleh peradilan non-negara tanpa persetujuan mereka. Dua teori tokoh tersebut yang menjadikan dasar pembagian kekuasaan negara. Tujuannya tersebut agar tidak adanya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi

kekuasaan yang absolut. Baca berikutnya Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi